

Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa

Nur Amilia Kartika Rahmi¹, Eka Vidya Putra^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik politik uang pada pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh beberapa calon kepala desa di Desa Ladang Panjang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang menunjukkan bahwa terdapat kecurangan dari beberapa calon kepala desa beserta timses yang sedang melakukan praktik politik uang. Pentingnya penelitian ini untuk memahami pemicu terjadinya praktik politik uang, bagaimana teknik kejadiannya di masyarakat dan pengaruh yang dibangun dari praktik politik uang terhadap masyarakat. penelitian ini menggunakan metode kualitatif tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan secara Purposive Sampling dengan informan sebanyak 30 orang yang terdiri masyarakat pemilih dan masyarakat timses. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Keabsahan data yang dikerjakan dengan cara triangulasi data serta teknik analisis data yang digunakan adalah yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Scrutz. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, praktik politik uang ini dapat mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan penerima politik uang untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, makna politik uang sendiri bagi masyarakat Desa Ladang Panjang mempunyai arti yang berbeda, tergantung siapa yang mengartikan. Ketiga, bagi sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang dengan pemahaman yang terbatas maka, sangat sulit agar terhindar dari politik uang.

Kata Kunci: Desa Ladang Panjang; Fenomenologi; Pilkadaes 2021; Politik uang.

Abstract

This study intends to explain the practice of money politics in the election of village heads caused by several candidates for village heads in Ladang Panjang Village. This research is motivated by a phenomenon which shows that there are frauds from several Village Head Candidates and the Timses who are conducting money politics practices. The importance of this research is to understand the triggers of the practice of money politics, how the techniques occur in society and the influence that is developed from the practice of money politics on society. This research uses a qualitative case study type method. The informant selection technique was purposive sampling with 30 informants consisting of the community, traditional leaders, village officials. Collecting data by means of observation, interviews and documentation studies. The validity of the data that was carried out by means of data triangulation and data analysis techniques used were those developed by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and data verification. This study was analyzed using the phenomenological theory of Alfred Scrutz. The results of the study confirm that first, the practice of money politics can create a situation between the giver and recipient of money politics to achieve their goals. Second, the meaning of money politics itself for rural communities has a different meaning. Third, for some people in the village of long fields with limited understanding, it is difficult to avoid money politics.

Keywords: Fenomenologi; Ladang Panjang; Money politic; Pilkadaes.

How to Cite: Ramadhana, I. & Ikhwan, I. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(3), 423-431.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Indonesia dengan jumlah populasi penduduk sekitar 279,497,778 juta jiwa merupakan salah satu Negara Demokrasi terbesar dunia ([Noviati, 2016](#)). Demokrasi memberikan pengertian bahwa sumber daya merupakan orang-orang dengan penjelasan, orang akan membuat norma yang bermanfaat dan menaungi hak-hak mereka. Supaya hal itu terjadi, wajib aturan sekaligus dukungan dan menjadi pijakan pada kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat. Terdapat 120 negara dari 192 negara di dunia menurut World Forum on Democracy, memilih demokrasi untuk menjadi tata kelola negara (Ikhtisar Glob. State Democr. Mengkaji Ketahanan Demokr, 2018). Maksudnya lebih dari setengah penduduk di dunia menggunakan demokrasi elektoral atau pemilihan umum dalam memilih para pemimpin pada negara secara langsung ([Bachtiar, 2014](#)). Pemilihan umum adalah bagian dan hasil pada sistem demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu Indonesia menyelenggarakan tiga jenis pemilu secara langsung. Pertama, pemilu anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemilu legislatif sudah berjalan sejak orde lama. Pemilu 1955 merupakan pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu. Pada orde baru Indonesia menyelenggarakan enam kali pemilu. Sedangkan pada era reformasi, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 merupakan pemilu ke 5 sejak runtuhnya orde baru. Untuk pertama kali, penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, pemilu eksekutif. pemilu eksekutif dapat dibagi dua yakni pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), baru dilaksanakan pada tahun 2004. Sampai tahun 2019 sudah berjalan empat kali pemilihan. Pilpres 2004 sampai 2014 dilaksanakan terpisah dengan pemilu legislatif, yakni setelah pemilu legislatif. Maka pada Pilpres 2019 dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Sebelumnya, pemilihan Presiden dilakukan melalui demokrasi perwakilan, melalui anggota DPR dan MPR. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Selanjutnya, pemilihan secara langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk di antaranya pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2005 diselenggarakan secara langsung sesuai dasar UU No. 32 tahun 2004 terkait pemerintahan daerah. Kepala daerah beserta wakil dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Di samping ketiga pilkada di atas, sebenarnya ada satu pemilu lagi yang diselenggarakan di Indonesia, yakni pemilihan kepala desa (Pilkades). Rozy et al., (2020). Pilkades adalah praktik kontestasi politik pada tahap pedesaan. Adapun yang terkait baik sebagai pelaksana, peserta, dan pemilihnya yaitu masyarakat desa tersebut.

Meski pilkades dilaksanakan pada tingkat terendah namun dinamika politik yang menyertainya tidaklah rendah. Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilu yang sengit karena kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh banyak orang. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh salah satu kebijakan pemerintahan pusat untuk memberikan dana desa sebesar satu milyar. Pilkades seringkali diwarnai berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggaran dalam pemilu yang marak terjadi adalah politik uang ([Guide et al, 2013](#)). Menentukan politik uang sama susahnya dengan membuktikan politik uang itu sendiri. Istilah lain dari politik uang yang kerap dipakai oleh peneliti yaitu beli suara, korupsi politik. Perilaku politik uang akan mendapat kan klientelisme dan patronase sehingga terjadi pertukaran ([Aspinall, Edward., & Berenschot, Aspinall, Edward., 2019](#)). Desa Ladang Panjang merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sarolangun. Desa Ladang Panjang merupakan salah satu proses pilkades dengan tingkat dinamika yang relatif dinamis. Kedinamisan tersebut salah satunya dapat dilihat dari munculnya isu praktik politik uang disetiap pilkades. Meski tidak dapat dibuktikan secara hukum, namun berdasarkan observasi awal praktik politik uang tersebut terjadi di setiap penyelenggaraan pilkades Ladang Panjang.

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 15 Februari 2022 di Desa Ladang Panjang, terhadap informan masyarakat yang berada di desa tersebut. Peneliti melihat dan mendengar beberapa informan memperoleh uang dari beberapa calon kepala desa dengan tujuan para calon kepala desa bisa memperoleh posisi kepala desa tersebut. Peneliti melihat beberapa masyarakat diantaranya pemuda, ibu rumah tangga, dan masyarakat lainnya. Peneliti juga mencoba bertanya salah satu masyarakat terkait politik uang, akan tetapi mereka banyak yang kurang mengerti dan beranggapan sepele. Mereka ketahui hanya memperoleh uang dari para calon kepala desa. Selain itu peneliti juga berusaha berdiskusi bersama beberapa masyarakat di Desa Ladang Panjang. Pemaparan masyarakat A menjelaskan dia akan memilih calon kepala desa tersebut, jika memperoleh uang dari para calon. Masyarakat B menyatakan jika ada dikasih calon kepala desa uang, kami terima. Masyarakat C menyatakan bahwa dengan adanya praktik politik uang maka bisa membantu keperluan keluarga mereka. Masyarakat D dan E menyatakan dapat uang dari beberapa calon lumayan buat tambahan. Keadaan ini membuat rasa ketertarikan peneliti untuk mendalami fenomena apa

yang terjadi terkait praktik politik uang ini. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana praktik politik uang di Desa Ladang Panjang.

Penelitian relevan yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana (2021), penelitian ini pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih. Penelitian relevan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akbar, (2016), penelitian ini pengaruh politik uang terhadap ikut serta masyarakat Barugae pada pilkada 2015. Penelitian relevan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shodikin, (2018), penelitian ini penegakan hukum larangan pemberian uang maupun materi lain ke pemilih. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian ini memiliki fokus objek penelitian kepada praktik politik uang yang dilakukan oleh kandidat kepala desa melalui timses dengan menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, (Mulyadi, 2013) dengan tipe penelitian studi kasus (Hidayat, 2019). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Penelitian dilaksanakan pada 7 Februari sampai Maret 2022. Alasan pemilihan lokasi penelitian di daerah ini masih banyak masyarakat Desa Ladang Panjang yang menerima politik uang pada dari calon kepala desa Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Pemilihan informan pada penelitian ini memakai teknik *Purposive Sampling dengan 30 orang informan*. Kriteria informan *pertama*, Informan merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Ladang Panjang yang memperoleh uang maupun materi dari calon kepala desa. *Kedua*, informan merupakan masyarakat pemilih dan timses yang menerima praktik politik uang. *Ketiga*, informan merupakan ibu rumah tangga yang sering memperoleh politik uang untuk tambahan keuangan. *Keempat*, Informan merupakan pemilih pemula yang hanya ikut-ikutan teman dalam memilih. Informan di atas akan membantu peneliti dalam melengkapi data terkait bentuk praktik politik uang yang dikerjakan oleh beberapa calon kepala desa.

Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan mengenai praktik politik uang pada pilkades. Peneliti juga melaksanakan wawancara mendalam melalui 30 informan penelitian. Studi dokumentasi yang peneliti lakukan mendokumentasi informan terkait penjelasan mengenai praktik politik uang pada pilkades. Triangulasi data yang peneliti kerjakan adalah triangulasi sumber dan metode. Proses analisis data yang dikerjakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh (Miles & huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

Politik Uang

Pada pilkades Desa Ladang Panjang 15 Juli 2021. Politik uang adalah hal luar biasa yang terjadi pada masyarakat Desa Ladang Panjang yang dilakukan calon kepala desa dan diterima oleh masyarakat setempat. Politik uang yaitu usaha menyuap pemilih melalui pemberian uang, jasa, atau materi lainnya supaya pengkhususan suara pemilih bisa diberikan kepada seseorang penyuar (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik politik uang ini dapat mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan penerima politik uang mencapai tujuan mereka. Pemberi politik uang memberi suatu jenis pertukaran dan bekerja sama dengan penerima politik uang dengan harapan penerima politik uang bisa membantu melalui memilih calon kepala desa pada saat pilkades dan pemberi politik uang juga memberikan sesuatu kepada penerima politik uang sesuai yang disepakati. Sedangkan politik uang Desa Ladang Panjang ini ada beberapa hal yang dilakukan pada pilkades Ladang Panjang seperti membentuk timses, pemetaan wilayah, nama yang diberi uang, pemberian uang atau materi, pemantauan di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan timses yang mempunyai pengaruh besar pada masyarakat, seperti penjelasan timses AW (29) yang mengatakan bahwa,

“...Benar sebelum saya dipercaya jadi timses biasanya kalau calon kepala desa ahli jelas dia akan berpikir berbagai hal misalkan keahlian seseorang calon timses ketika mengambil suara, efeknya di masyarakat, dan kepatuhan. Tambah besar efek seseorang di masyarakat maka semakin banyak calon kepala desa yang mendatanginya untuk di buat timses dalam menyusun orang-orang dekatnya buat dukung mereka pemilihan nanti...”(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022).

Hal ini senada dengan ungkapan Informan AC (40) bahwa,

“...Seminggu sebelum pemilihan kita diberi uang sama calon kepala desa untuk dikasih masyarakat yang bisa dalam mendukung calon kepala desa tersebut dan masyarakat yang

sudah di list penerima dana yang merupakan orang-orang yang siap memilih...”(Wawancara pada tanggal 24 Februari 2022).

Permasalahan yang dialami oleh calon adalah pesaing, pesaing ini membuat para calon kades tidak hanya tinggal diam melihat para kandidat memperoleh suara terbanyak melainkan sembari melakukan pemantauan yang berkelanjutan sampai hari pemilihan terhadap para calon kades lain sekaligus dengan memperbanyak jumlah pendukung mereka masing-masing melalui bantuan para timses. Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu informan TM (30) yang merupakan timses yang terus memantau pergerakan calon lain bahwa;

“...Kemarin itu saya pergi jalan-jalan ke Dusun Mudik, tengah, dan hilir banyak sekali kelihatannya pendukung calon kandidat no 5 di mudik, akan tetapi dusun tengah kelihatannya banyak pendukung kandidat no 1....”(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan MM (50) bahwa:

“...Kemarin ketika dikasih uang sekaligus barang oleh timses no 3 dan timses no 4 juga minta pilih mereka jadi kami di rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 3 dan sebaliknya dengan tujuan yang memberi tetap kami wujudkan....”(Wawancara pada tanggal 05 Februari 2022).

Menurut penjelasan Informan AC dan Informan MM di atas menyatakan beberapa hari menjelang pemilihan uang sudah dikasih oleh calon kades melalui timses untuk diberikan kepada masyarakat yang sudah ditargetkan dengan cara mencatat siapa-siapa saja dan tidak salah tujuan, sedangkan penerima politik uang juga ingin mewujudkan keinginan calon yang memberikan uang maupun materi sama mereka meskipun ada beberapa calon yang telah memberi kepada penerima politik uang mereka tetap ingin mewujudkan hak suara mereka untuk calon tersebut meskipun suaranya dibagikan, yang terpenting terpilih semua calon yang sudah memberi mereka tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam menolak praktik politik uang yaitu perekonomian masyarakat yang rendah, pemahaman terkait politik uang sedikit, rasa kekeluargaan sehingga tidak enakan untuk menolak pemberian oleh calon. Pemberian oleh para calon pilkades menjadi penambah kebutuhan sehari-hari bagi mereka. Meskipun yang didapatkan tidak seberapa namun itu sangat ditunggu. Kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam menghalangi praktik politik uang. Hal ini dikarenakan masyarakat dengan perekonomian lemah. Kondisi ini memicu tingginya tingkat politik uang dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang ini terjadi dikarenakan Pemahaman masyarakat terkait politik uang yang masih sangat rendah sekaligus perekonomian yang rendah ditambah dengan sogokan beberapa calon kepala desa.

Makna Politik Uang Dalam Masyarakat

Makna politik uang bagi masyarakat Desa Ladang Panjang memiliki arti yang berbeda, tergantung siapa yang memahami dan mendapatkan politik uang itu sendiri. Politik uang bagi masyarakat Desa yang menempuh pendidikan tinggi akan memahami bahwa hal itu salah namun bagi masyarakat yang kurang memahami politik uang ini adalah hal biasa yang sering terjadi pada saat pemilihan baik itu pada pemilihan tingkat yang tertinggi sampailah pada tingkat terendah. Politik uang ini menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang bahkan ada yang tidak mau memilih jika tidak ada nya politik uang tersebut. Berbeda sekali dengan masyarakat yang menerima politik uang mereka akan datang ke TPS dengan semangat luar biasa untuk memilih.

Beberapa studi di berbagai daerah menjelaskan bermacamnya arti uang itu bagi penerima misalkan yang diungkapkan oleh Schaffer dan Scheduler (2007, 25-27), bahwa para penerima ada yang mengartikan sebagai bayaran, hadiah, ganti rugi dosa masa lalu, perundungan, pengenalan kebijakan seorang calon, pengenalan kejelekan seorang calon, sekaligus ada juga yang mengibaratkan sebagai tanda kekuatan. Pada masyarakat Desa Ladang Panjang saat seseorang memperoleh uang dari calon kepala desa jelas tidak bisa diartikan orang tersebut telah dibeli suaranya. Terutama dalam Pilkades, alterasi uang yang disebarkan oleh timses kedatangan tumpang tindih satu orang pemilih bisa mendapat uang dari beberapa calon. (Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada (Eds), 2015. Menyertakan pilkades bukan kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat dalam turut serta pada pemilihan calon kepala desa akan tetapi politik uang membuat solusi para calon kepala desa dalam membuat masyarakat menjadi wajib dalam berkontribusi pada pemilihan calon kepala desa yang berlangsung. Karena masyarakat memaknai itu terasa masalah jika tidak melaksanakan partisipasi politik setelah menerima pemberian dari calon kepala desa hal ini disampaikan oleh Informan IK (42 Tahun);

“...Jika ada yang ngasih kami uang atau barang maka tidak bagus untuk ditolak karena dia akan tersinggung terutama orang dekat, nanti sedih, jadi ambil saja uangnya, milih siapa nanti itu urusan akhir...” (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan MS (50) bahwa;

“...Kemarin ketika dikasih uang sekaligus barang oleh timses no 3 dan timses no 4 juga mintak pilih mereka jadi kami di rumah membagikan suara kami, sebagian ke no 3 dan sebagian lagi no 4 karena tidak enak juga kita dikasih nya uang sama barang tidak mungkin kita tidak memilihnya...” (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

Hal ini juga sama dengan penjelasan informan IK (42) yang dikarenakan informan mempunyai emosional yang bagus dan sama yang telah mendapat pemberian uang maupun materi dari timses calon kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas, rata-rata informan menjawab bahwa mereka sering mendapat perhatian sekaligus politik uang dari calon kepala desa dengan maksud saling bantu saat pilkades nanti, meski ada beberapa penerima politik uang hanya mengambil pemberian saja belum tentu mereka memilih calon kepala desa tersebut, itu sudah cukup bahwa pemberian yang dilakukan oleh calon kepala desa belum tentu akan memperoleh suara yang tinggi, hanya saja terdapat juga beberapa masyarakat yang beranggapan kalau sudah diberi oleh calon kita juga harus bantu calon tersebut.

Jika penelitian di atas dianalisis memakai teori fenomenologi Alfred Schutz terkait pemahaman, perbuatan, ucapan, dan interaksi adalah prasyarat bagi eksistensi sosial apapun (Mulyana, 2001). Schutz menjelaskan fenomenologi menelaah bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-hari mereka, terutama bagaimana individu dengan kesadarannya membangun arti dari hasil interaksi dengan individu lainnya (Cresswell, 1998). Fenomenologi yang dipakai pada Penelitian ini dalam pandangan Alfred Schutz lebih menekankan pentingnya intersubjektivitas. Fokus dari fenomenologi Schutz yaitu memandang bahwa pemahaman atas perbuatan, ucapan, dan interaksi adalah prasyarat bagi eksistensi sosial apapun (Haris et al., 2019). Pada teori fenomenologi Alfred Schutz ada dua hal yang penting diamati diantaranya bagian pengetahuan dan perbuatan. penting dari pengetahuan pada kehidupan sosial menurut Alfred Schutz yaitu akal untuk menjadi sebuah pengatur dari pemahaman manusia pada kehidupan kesehariannya. Karena akal adalah indera yang asli dengan mengaitkan pendengaran, penglihatan, dan peradaban yang sering dijembatani dan dibarengi pemikiran dan aktivitas kesadaran. Bagian pengetahuan yang terdapat dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah kehidupan keseharian. Sebagian besar masyarakat Desa Ladang Panjang merupakan masyarakat tingkat ekonomi menengah. Faktor ekonomi merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kepala desa hal ini sejalan dengan teori fenomenologi dimana mencari jawaban terkait arti dari suatu fenomena, pemilih akan memilih kalau ia merasa ada balasan yang akan diterima. Ketika pemilih merasa tidak memperoleh keuntungan dengan memilih calon kepala desa yang sedang bertarung, ia tidak akan ikut serta dan melaksanakan pilihan pada proses Pilkades hal ini juga searah dengan pilar ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon kepala desa akan melaksanakan berbagai advertensi dan kampanye dengan maksud menarik perhatian dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilihan. Biasanya masyarakat menerima uang maupun materi dari para calon, sekaligus memaknai akan hal ini harus setimpal apa yang kita terima dengan yang didapatkan. Hal ini diungkapkan oleh Informan WN (48) yang menyatakan bahwa;

“...Cara saya berterimakasih atas pemberian yang diberikan kepada saya, biasanya dengan mengartikan pemberian tersebut lewat pembuktian harus menolong saat pilkades dengan mencoblos calon kades yang telah memberikan sesuatu kepada saya...” (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan MS (50) dan Informan IK (42) bahwa makna politik uang bagi mereka dalam pemilihan merupakan harus dibalas dengan datang ke TPS saat Pilkades. (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022). Ungkapan beberapa informan di atas usaha dalam memaknai dengan cara datang dan memilih calon yang telah memberi uang atau materi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha memberi masyarakat dengan harapan balasan suara dari pemilih akan menang saat pemilihan. Jika dianalisis menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz terkait politik uang dalam masyarakat. untuk menjadi alat pengatur dari pemahaman manusia terkait politik uang yang terjadi dalam masyarakat saat ada pilkades Desa Ladang Panjang. Hal ini diungkapkan oleh Informan WN (48) yang menyatakan bahwa;

“...Politik uang sering terjadi di Desa Ladang Panjang dengan maksud menarik perhatian masyarakat, begitu juga masyarakat memaknai akan hal itu biasa saja bahkan harus dipilih calon tersebut” (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022).

Menurut penuturan informan WN (48), informan MS (50), dan informan IK (42) bahwa praktik politik uang dilakukan lewat pemberian uang, materi sekaligus jasa dijalankan dengan baik dan bagaimana mestinya, (Wawancara pada tanggal 16 Februari 2022). Calon kandidat maupun timses melakukan pemberian tersebut kepada yang telah ditargetkan, jika sesuai waktu dan individu disitulah titik pemberian dijalankan. Misalnya seminggu sebelum Pilkades pemberian sudah mulai berjalan, uang, sembako sudah diterima masyarakat. bentuk pemantauan yang dilakukan oleh timses calon dengan selalu mengingatkan jangan lupa datang ke TPS dan pilih calon kepala desa no ini. ternyata dari penjelasan semua informan terkait praktik politik uang disini sebenarnya permasalahannya terletak pada calon pemimpin yang memberi peluang, pemahaman masyarakat yang kurang terkait bahaya politik uang dan sikap tidak peduli, dengan demikian praktik politik uang membuat mereka dengan leluasa bermain curang dalam memperoleh posisi yang diinginkan. Jika dianalisis dengan menggunakan Teori Fenomenologi Alfred Schutz terlihat bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh calon dan diterima oleh sebagian masyarakat. Namun terbukti pemberian tersebut bisa memperoleh dukungan suara yang lumayan dari masyarakat. hal ini diungkapkan oleh Informan EF yang menyatakan bahwa

“...Terkadang pemberian uang yang dilakukan oleh calon pilkades kepada masyarakat membuahkan hasil yang lumayan, dikarenakan banyak masyarakat yang memilih dikarenakan adanya pemberian dari calon maupun timses tersebut yang dikarenakan sifat tidak enakan...” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022).

Hal senada diungkapkan oleh Informan NN (43) yang mengatakan bahwa;

“...Untuk membuat ketertarikan masyarakat memilih terhadap calon kepala desa mereka akan memulai lebih duluan memberi perhatian dan lainnya kepada masyarakat walupun tidak banyak...” (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022).

Sesuai dengan penuturan Informan EF (45) dan Informan NN (43) bahwa makna politik uang yang dilakukan oleh beberapa calon maupun bantuan timses dalam pilkades dengan tujuan memperoleh suara dari para pemilih saat pilkades nanti merupakan hal ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat untuk bisa mendapat pemberian dari para calon melalui timses. Politik uang hal yang biasa saja bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang pengetahuannya kurang terkait politik uang. Politik uang juga dapat membantu kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan wawancara diatas terlihat sekali bahwa politik uang sangat berpengaruh dalam masyarakat, sebagian mereka memaknai pemberian tersebut harus dibalas dengan memilih seorang calon pemberi uang maupun barang tersebut. Sehingga merasa kurang enak jika tidak datang ke TPS untuk memilih calon pemberi uang maupun barang tersebut.

Sikap Terhadap Politik Uang

Sikap masyarakat Desa Ladang Panjang yang condong merespon politik uang dan keadaan ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari para calon kepala desa ataupun timses dengan berbagai pemberian uang maupun barang, bahkan melibatkan bantuan Masyarakat Desa Ladang Panjang dengan berbagai perjanjian dan harapan selanjutnya. Sikap masyarakat Desa Ladang Panjang yang adem dan cenderung acuh terhadap permainan politik uang akan tetapi mereka masih mendapatkannya, membuat para calon kepala desa semakin sigap dalam mempermainkan politik uang tersebut. Terkait sikap terhadap politik uang di atas ada beberapa hal yang terkait diantaranya sikap masyarakat, budaya dalam pilkades, pengaruh ekonomi, pendidikan politik yang rendah. Berdasarkan wawancara dengan informan SY (36 Thn) yang telah lama ikutserta dalam proses pilkades dan sudah sering kali mendapatkan uang, barang maupun sejenisnya dari calon kepala desa maupun timses;

“...Saat mau memasuki momen pilkades yang paling dinanti-nanti adalah bagi-bagi uang karena setiap ada pilkades sering ada yang bagi-bagi uang maupun sejenisnya...” (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2022).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan HH (48) bahwa;

“...Sekiranya ada yang mau memberi kami baik uang, dan sejenisnya. Baik timses ataupun langsung calon kepala desa maka kami akan menerima dengan sangat bahagia karena sayang sekali untuk ditolak jika itu membantu kami memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya dipakai untuk keperluan keluarga. Biasanya uang yang dikasih untuk keluarga kami biar keluarga kami siap untuk mendukung nanti saat pemilihan...” (Wawancara pada tanggal 14 Februari 2022).

Dengan demikian sikap masyarakat menurut penuturan informan SY (36), dan informan MS (48) saling menolong dan tidak boleh menolak. Begitulah pernyataan yang telah terpaku dalam diri masyarakat Desa Ladang Panjang. Uang, maupun sejenisnya bentuk politik uang calon kepala desa ibarat sebagai keuntungan bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak dan karena telah dibagi spontan masyarakat juga harus memberi entitas juga yaitu dengan mencoblos, bahkan ikut menjayakan politik uang demi memenangkan calon kepala desa tersebut sebagai luapan terimakasih terhadap uang yang dikasih oleh calon kepala desa. Dalam hal ini cultur yang autentiknya bersifat baik dan benar, telah menyimpang dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling membantu tidak lagi dalam hal kejujuran melainkan untuk hal penyelewengan. Masyarakat yang masih mengikuti tinggi cultur ini menjadi sasaran legit bagi para calon kepala desa dalam melaksanakan politik uang tanpa curiga hal ini diutarakan oleh informan JP (56) yang berstatus timses dari salah satu calon kepala desa:

“...Memang masyarakat di pedesaan sangat amat terbuka jika dikasih uang mereka sedikit menolak dan enaknyanya lagi masyarakat di pedesaan seperti Desa Lidung, masyarakatnya amat terbuka dan condong membebaskan aktivitas politik uang maupun sejenisnya dan uang atau apapun yang dikasih sama mereka itu lebih tidak hampa karena mereka tekniknya kalau ada kasih uang ya harus dipilih kata mereka masih memuliakan nilai-nilai saling membantu misal saya tolong masalah keuangan mereka dan mereka nanti tolong dukung kandidat kepala desa saya...”(Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022).

Budaya masyarakat Ladang Panjang yang condong lebih menyepelkan pelaku politik uang dalam meraup suara dengan melakukan pemberian barang dan uang memang sangat susah dihapuskan karena hal ini selalu saja terjadi dalam setiap pilkades dan masyarakat juga merasa tidak masalah dengan hal tersebut. Kemiskinan merupakan kondisi dimana kedapatan ketidakmampuan dalam memenuhi keperluan, pendidikan dan kesehatan. Keadaan miskin tersebut seperti memeras sebagian masyarakat untuk cepat mendapatkan uang, politik uang pun menjadi medan para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tanpa berpikir konsekuensi yang akan didapatkan yaitu aktivitas jual beli suara adalah aktivitas inkonstitusional. Penting bagi masyarakat adalah bahwa mereka memperoleh uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kepala desa hal ini sejalan dengan teori fenomenologi dimana mencari jawaban terkait arti dari suatu fenomena, pemilih akan memilih kalau ia merasa ada balasan yang akan didapatnya. Ketika pemilih merasa tidak memperoleh keuntungan dengan memilih calon kepala desa yang sedang bertarung, ia tidak akan ikut serta dan melaksanakan pilihan pada proses pilkades hal ini juga searah dengan pilar ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon kepala desa akan melaksanakan berbagai advertensi dan kampanye dengan maksud menarik perhatian dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilihan. Sebagian dari informan yang penulis wawancara terkait faktor ekonomi merupakan dampak sehingga mereka menerima politik uang lebih ramai ketimbang dengan faktor lainnya, hal tersebut dipengaruhi oleh bagian ekonomi masyarakat Desa Ladang Panjang yang sebagian besar masyarakat dengan perekonomian lemah.

Tidak semua masyarakat Desa Ladang Panjang mengetahui terkait politik uang, bagaimana bentuknya, apa efek yang ditimbulkan dari politik uang, ini semua disebabkan oleh kurangnya sebagian wawasan dari masyarakat Desa Ladang Panjang terkait politik uang dan juga sikap cuek terhadap politik di Indonesia termasuk pada Desa Ladang Panjang sendiri, sehingga ketika ada pesta politik seperti pilkades, masyarakat akan tidak peduli ada maupun tidaknya pilkades. Tidak mengenal calon kepala desa bahkan tidak pernah datang ke pemilihan kepala desa sekalipun juga tidak menjadi permasalahan. Kegiatan politik uang kerap kali mewarnai tiap-tiap pemilihan kepala desa Ladang Panjang hal ini membuat pilkades tidak berjalan sesuai dengan arti demokrasi masyarakat saat memilih calon pemimpin kecuali adanya rangsangan dari timses maupun calon kepala desa langsung untuk memilih mereka dengan banyak tawaran sebagai bonus dan masyarakat yang mudah teralihkan oleh keuntungan sekejap. Hal ini disampaikan oleh informan RM (43) merupakan salah satu masyarakat penerima politik uang:

“...Jika ada yang ngasih uang, barang, dan sejenisnya maka akan saya terima karena kapan lagi kita bisa proleh uang maupun barang secara cuma-cuma dari calon kepala desa...”(Wawancara pada tanggal 7 Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat cenderung mendapat politik uang dan sejenisnya dari beberapa calon kepala desa, terkadang sebagian dari mereka hanya mengambil uang dan tidak memilih calon yang telah memberi uang kepada mereka, namun ada juga yang memilih calon kepala desa sesuai dengan siapa yang memberi mereka uang, dan pemberian yang dilakukan calon kebanyakan diterima oleh masyarakat.

Kesadaran masyarakat akan signifikannya pilkades yang bersih untuk mendapatkan calon pemimpin yang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan memang masih sangat minim dan hal ini membuat masyarakat memilih bukan lagi karena merasa pilkades melainkan kewajiban masyarakat untuk ikut serta didalamnya kecuali mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari timses ataupun calon kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian di atas bagi masyarakat Desa Ladang Panjang dengan pemahaman politik yang minim sekaligus perekonomian yang sulit maka sangat susah bagi mereka supaya terhindar dari politik uang, karena hal tersebut kebutuhan bagi mereka sehingga susah untuk dihindari. Sikap masyarakat Desa Ladang Panjang yang condong merespon politik uang dan keadaan ini dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari para calon kepala desa ataupun timses dengan berbagai pemberian uang maupun barang dan sejenisnya, bahkan melibatkan bantuan pemuda Desa Ladang Panjang dengan berbagai perjanjian dan harapan selanjutnya. Sikap masyarakat Desa Ladang Panjang yang adem dan cenderung acuh terhadap permainan politik uang akan tetapi mereka masih mendapatkannya, membuat para calon kepala desa semakin sigap dalam memperlakukan politik uang tersebut. Saling menolong dan tidak boleh menolak, begitulah pernyataan yang telah terpaku dalam diri masyarakat Desa Ladang Panjang. Uang, barang dan lainnya dari calon kepala desa ibarat sebagai keuntungan bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak dan karena telah dibagi spontan masyarakat juga harus memberi entitas juga yaitu dengan memilih, bahkan ikut menjayakan politik uang demi memenangkan calon kades tersebut sebagai luapan terimakasih terhadap uang yang dikasih oleh calon kades. Dalam hal ini kultur yang autentiknya bersifat baik dan benar, telah menyimpang dan disalah artikan oleh masyarakat. saling membantu tidak lagi dalam hal kejujuran melainkan untuk hal penyelewengan. Masyarakat yang masih mengikuti tinggi kultur ini menjadi sasaran legit bagi para calon kades dalam melaksanakan politik uang tanpa curiga.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap fenomena praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa dengan menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Dalam pelaksanaan politik uang yang dilakukan oleh calon dalam upaya memperoleh kursi kepala desa. Tentunya hal ini menjadi fenomena sekaligus perhatian masyarakat setempat, karena calon kepala desa kepala desa yang banyak melakukan politik uang lah yang banyak dipilih oleh masyarakat.

Fenomenologi Schutz adalah sebuah usaha memahami kesadaran yang dialami dari tiap pandang orang yang mengalami sendiri. Fenomenologi membagi sebuah peristiwa tidak pernah berdiri sendiri, itu sebabnya fenomenologi dituntut untuk mencari awal-awal masalah secara mendalam dari tiap-tiap gejala yang diteliti dengan melihat semua perbuatan, ucapan, tulisan, gambar, informasi lain, kata kunci subjek dan konteks kejadian peristiwa semua itu mengandung arti (Rahardjo, 2018). Dapat dijelaskan bahwa fenomenologi diartikan sebagaimana studi terkait pengalaman hidup individu untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberi arti atau pandangan dari kejadian, dalam hal ini akan dilihat bagaimana makna atau perspektif masyarakat terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa (Ritzer, 2011).

Proses terjadinya persepsi bisa dijelaskan mulai dari objek menimbulkan rangsangan dan rangsangan mengenai alat indra lanjut rangsangan diterima oleh alat indra dan dilanjutkan oleh alat sensoris ke otak, selanjutnya terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang di dengar dan apa yang di raba, dan menghasilkan respon terhadap apa yang diamati (Suryana, 2013). Terjadinya persepsi dipengaruhi oleh indera, pelaku persepsi, tujuan dan sasaran sekaligus situasi.

Setiap individu dalam melihat suatu objek akan menghasilkan persepsi yang berbeda contoh dalam praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala desa, setiap masyarakat yang mendapat dan mendengar politik uang tersebut memperoleh persepsi yang berbeda terhadap yang dilakukan oleh calon kepala desa. Proses timbulnya persepsi ini didapatkan melalui proses interaksi yang terjadi antara calon kepala desa dan masyarakat, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman setiap masyarakat dan persepsi dipengaruhi oleh wawasan masyarakat yang akan menimbulkan suatu persepsi dan menghasilkan makna secara subjektif, hasil yang telah diperoleh adanya persepsi yang berbeda-beda antar masyarakat terhadap tugas calon kepala desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik politik uang pada pemilihan kepala desa (Studi Kasus di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun) ada beberapa faktor *Pertama*, praktik politik uang ini dapat mewujudkan sebuah keadaan antara pemberi dan penerima politik uang untuk mencapai tujuan mereka. *Kedua*, makna politik uang sendiri bagi masyarakat Desa Ladang Panjang mempunyai arti yang berbeda, tergantung siapa yang mengartikan. *Ketiga*, bagi sebagian masyarakat Desa Ladang Panjang dengan pemahaman yang terbatas maka, sangat sulit agar terhindar dari politik uang.

Kelemahan penelitian ini terletak pada proses penelitian, dari segi waktu yang sangat terbatas, peneliti tidak bisa melihat dan mengamati secara kontinyu proses praktik uang yang dilakukan oleh calon kepala

desa maupun timses kepada masyarakat, dan pencarian informan yang sulit didapatkan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Atas dasar itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis secara lebih mendalam tentang perspektif masyarakat terhadap praktik politik uang pada pemilihan kepala desa. Kajian ini penting karena dibutuhkan masyarakat yang responsif agar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam masyarakat dapat dikurangi.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2016). Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba).
- Aspinall, Edward., & Berenschot, w. Aspinall, Edward., & H. (2019). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Guns For Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.
- Haris, A. et al. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930>
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *ResearchGate*, August, 1–13.
- Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi. (2018). *Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*. <https://doi.org/10.31752/idea.2018.55>
- Mahdiana, M. (2021). Pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua rt 01 di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai. IAIN Palangkaraya.
- Miles, B. & Huberman, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Rahardjo, R. (2018). Studi Fenomenologi itu Apa? *Uin-Malang*, 1–4.
- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Tri Yukanti, Hermi Yanzi, Y. N. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13557/0>